



Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z

Mastura Karateng, Bakri, Burhanuddin *

Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Sosial, Universitas Puangrimaggalatung, Jl.

Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo,

Sulawesi Selatan 90918 Indonesia

*Penulis Korespondensi: burhanuddinsonte@yahoo.com

Abstract *This study aims to determine the village government's efforts to encourage community participation in development in Mario Village, Tanasitolo District, Wajo Regency, and to identify inhibiting and influencing factors in the implementation of these efforts. Community participation is considered a crucial element in sustainable village development, as without active involvement from residents, development programs are difficult to achieve optimal results. This study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This approach allows the researcher to capture in-depth insights and perspectives directly from the community and village officials. This method allows the data obtained to more comprehensively describe the dynamics of community participation and the strategies implemented by the village government. The results show that the village government has implemented various efforts to encourage community participation, including through village deliberations, mutual cooperation activities, and community service. Community involvement was encouraged through collective decision-making and shared responsibilities in development programs. These efforts have generally had a positive impact on community involvement. However, the study also found inhibiting factors, particularly the community's economic limitations that affect their ability to participate in development. Furthermore, some residents still face challenges in terms of awareness and understanding of the importance of active participation. Therefore, more inclusive strategies oriented towards the socio-economic conditions of the local community are needed. Inclusive policies and adaptive strategies are essential to fostering sustainable rural development. This research is expected to serve as a reference for village governments and other stakeholders in formulating more effective policies, so that village development can proceed effectively, sustainably, and truly benefit all levels of society.*

Keywords: *Community Participation; Inclusive Policy; Mutual Cooperation; Village Development; Village Government.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan di Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pengaruh dalam pelaksanaan upaya tersebut. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, karena tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga, program pembangunan sulit mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. *This approach allows the researcher to capture in-depth insights and perspectives directly from the community and village officials.* Dengan metode ini, data yang diperoleh dapat menggambarkan secara lebih komprehensif dinamika partisipasi masyarakat serta strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat, antara lain melalui musyawarah desa, kegiatan gotong royong, dan kerja bakti. *Community involvement was encouraged through collective decision-making and shared responsibilities in development programs.* Upaya tersebut secara umum telah memberikan dampak positif terhadap keterlibatan warga. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya faktor-faktor penghambat, khususnya keterbatasan ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan mereka untuk ikut serta dalam pembangunan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal kesadaran dan pemahaman sebagian warga mengenai pentingnya partisipasi aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. *Inclusive policies and adaptive strategies are essential to foster sustainable rural development.* Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Gotong Royong; Kebijakan Inklusif; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa; Pemerintah Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat mandiri dan sejahtera. Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014. Partisipasi ini mencakup peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, di Desa Mario, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih rendah (di bawah 50%). Rendahnya keterlibatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga tentang pentingnya peran mereka, lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta minimnya transparansi informasi pembangunan. Selain itu, budaya gotong royong dan forum musyawarah belum dimanfaatkan secara optimal.

Permendagri No. 66 Tahun 2007 menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah, mufakat, dan gotong royong, dengan karakteristik utama berupa pemberdayaan dan keterlibatan aktif masyarakat. Rendahnya partisipasi di Desa X menyebabkan lambannya pembangunan, sehingga perlu ada upaya dari pemerintah desa untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik meneliti “Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.”

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z dan Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Dan Pengaruh Dalam Pelaksanaan Upaya Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Z .

2. TINJAUAN PUSTAKA

Upaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, atau mencari solusi, sebagaimana didefinisikan dalam KBBI dan oleh Poerwadarminta. Upaya berkaitan erat dengan pemanfaatan sarana dan prasarana serta dipengaruhi oleh metode dan alat yang digunakan. Sementara itu, partisipasi secara etimologis berarti keterlibatan atau keikutsertaan. Menurut para ahli, partisipasi meliputi keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti saran, tenaga, barang, hingga jasa, dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan emosional, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan bertanggung jawab atas hasil

yang dicapai. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, mencakup tiga aspek utama: (1) keterlibatan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan; (2) keterlibatan dalam memikul tanggung jawab dan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan, seperti pendanaan, pengawasan, dan aktivitas produktif; serta (3) keterlibatan dalam menerima hasil pembangunan secara adil dan merata.

Sementara itu, menurut Huraerah, partisipasi masyarakat dapat berbentuk: (a) partisipasi dalam pikiran (ide dan saran), (b) partisipasi tenaga (keterlibatan fisik), (c) partisipasi harta benda (dukungan materi), (d) partisipasi keterampilan (kontribusi keahlian), dan (e) partisipasi sosial (kegiatan kemasyarakatan)..

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi ke dalam empat bentuk utama:

- a. Partisipasi dalam perencanaan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemilihan alternatif program.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan, yakni keterlibatan dalam menjalankan program melalui kontribusi sumber daya, koordinasi, dan pengelolaan.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, yaitu sejauh mana masyarakat merasakan hasil program secara kuantitas dan kualitas.
- d. Partisipasi dalam evaluasi, yakni keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, menurut Angell (dalam Saca Firmansyah), partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Usia, di mana usia produktif lebih cenderung aktif berpartisipasi.
- b. Jenis kelamin, dengan peran perempuan yang semakin meningkat seiring perkembangan sosial.
- c. Pendidikan, yang memengaruhi cara pandang dan keterlibatan sosial.
- d. Pekerjaan dan penghasilan, yang menentukan kesiapan individu untuk terlibat.
- e. Lamanya tinggal, yang memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan dalam lingkungan sosial.

Menurut Solekhan, hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meliputi dua hal utama: (1) terbatasnya ruang partisipasi, di mana forum-forum yang tersedia sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak efektif menampung aspirasi; dan (2) melemahnya modal sosial, karena jaringan sosial masyarakat cenderung eksklusif dan kurang terlibat dalam pemerintahan desa. Dwiningrum menambahkan beberapa faktor penghambat lainnya, seperti

sikap apatis, kondisi geografis desa yang terpencil, jumlah penduduk, serta keterbatasan ekonomi. Untuk mendorong partisipasi, diperlukan upaya seperti:

- a. Membangun hubungan dan komunikasi yang efektif.
- b. Meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap Pembangunan.
- c. Memperlancar komunikasi antar potensi lokal,
- d. Menerapkan prinsip kerja sama dalam semua tahap pembangunan.
- e. Partisipasi masyarakat dan kepemimpinan pemerintah desa harus berjalan secara sinergis.
- f. Keberhasilan pembangunan desa hanya dapat dicapai melalui kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan berasal dari kata "bangun" yang berarti bangkit, dan dimaknai sebagai **upaya peningkatan kapasitas untuk menciptakan perubahan dan mempengaruhi masa depan**. Secara umum, pembangunan adalah proses terencana yang bertujuan menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan politik demi **meningkatkan kualitas hidup masyarakat**.

Beberapa pendapat ahli:

- a. **Sondang P. Siagian**: pembangunan sebagai upaya terencana menuju modernitas.
- b. **Listyaningsih**: proses menuju perbaikan kondisi negara.
- c. **Tjokroamidjojo**: perubahan pola pikir dari tradisional ke modern.
- d. **Joseph J. Spengler**: peningkatan kenikmatan hidup, termasuk demokrasi dan kesejahteraan.
- e. **Afifuddin**: pembangunan sebagai upaya membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat.
- f. **Rostow**: proses linier dari keterbelakangan menuju kemajuan.
- g. **Husein Umar**: perubahan menuju kondisi lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya.

Menurut **UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1)**, pembangunan desa bertujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas hidup
- c. Menanggulangi kemiskinan Dengan cara: memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembangunan desa juga menekankan nilai **kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong**, serta prinsip **keadilan sosial dan perdamaian**. Pembangunan desa merupakan **strategi kolektif** antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan memanfaatkan kearifan lokal. Program pembangunan sektoral yang masuk ke desa harus diinformasikan dan disesuaikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaannya. Selain itu, pembangunan kawasan

perdesaan bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan antara lain:

- a. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu pada pencapaian sasaran pengembangan berdasarkan Trilogi Pembangunan, yaitu:
 - a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
 - b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
 - c) Stabilitas yang sehat dan dinamis.

Ketiga unsur ini diterapkan di seluruh sektor secara terpadu dan saling terkait, baik di desa maupun kota.

- b. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan desentralisasi yang tepat.

Perencanaan Pembangunan Desa (Pasal 79)

- a. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- b. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun;
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun.
 - c) RPJMDes dan RKPDDes ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d) Peraturan desa mengenai RPJMDes dan RKPDDes merupakan satu-satunya dokumen resmi yang digunakan untuk perencanaan di tingkat desa.
 - e) Dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) sesuai peraturan yang berlaku.

- f) Program pemerintah dan pemerintah daerah yang berskala lokal dikoordinasikan dan dilegalisasikan pelaksanaannya kepada desa.
- g) Perencanaan pembangunan desa juga menjadi salah satu sumber masukan untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan (Pasal 80)

- a. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa.
- b. Pemerintah desa wajib mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat, dan/atau APBD kabupaten/kota.
- d. Prioritas pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan;
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian yang produktif;
 - d) Pemanfaatan teknologi yang sesuai untuk kemajuan ekonomi;
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pasal 81)

- a. Dilaksanakan sesuai dengan RKPDdes;
- b. Dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan semangat gotong royong;
- c. Menggunakan kearifan lokal dan sumber daya alam yang tersedia di desa;
- d. Pembangunan lokal berskala desa dilakukan secara mandiri;
- e. Program sektoral dari luar desa harus diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan.

Pengawasan Pembangunan Desa (Pasal 82)

- a. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Masyarakat juga berhak memantau pelaksanaan pembangunan tersebut.
- c. Hasil pemantauan dan keluhan masyarakat dapat dilaporkan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk APBDes, melalui layanan informasi publik dan Musyawarah Desa minimal satu kali setahun.

- e. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

Infrastruktur adalah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental dan dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas. Menurut Sondang P. Siagian, pembangunan infrastruktur merupakan upaya terencana untuk mendorong pertumbuhan dan menyediakan prasarana penunjang pembangunan. Infrastruktur tidak hanya mencakup struktur fisik, tetapi juga layanan, proses, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karakteristik infrastruktur antara lain:

- a) digunakan bersama oleh banyak orang,
- b) bersifat permanen,
- c) mencakup layanan dan proses,
- d) terhubung secara fisik dengan struktur lain, dan
- e) terpisah dalam kepemilikan dan pelaksanaannya.

Menurut Kuncoro, infrastruktur meliputi sistem fisik seperti transportasi, air, dan fasilitas publik yang menunjang kebutuhan dasar manusia. Infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, pemenuhan hak dasar (pangan, papan, pendidikan, kesehatan), dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa bertujuan memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri, pembangunan sarana fisik mencakup:

- a) transportasi perdesaan (jalan, jembatan, tambatan perahu),
- b) dukungan produksi pertanian (irigasi),
- c) pemenuhan kebutuhan dasar (air minum dan sanitasi).

Dengan demikian, infrastruktur merupakan modal penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan, khususnya di wilayah perdesaan. Tujuan pembangunan desa menurut Adisasmita dan Rahardjo adalah agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus, tujuan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan ketertiban seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna terhadap perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antarsektor dan kelembagaan dalam kerangka pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berencana dengan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Adapun beberapa pengertian pembangunan antara lain:

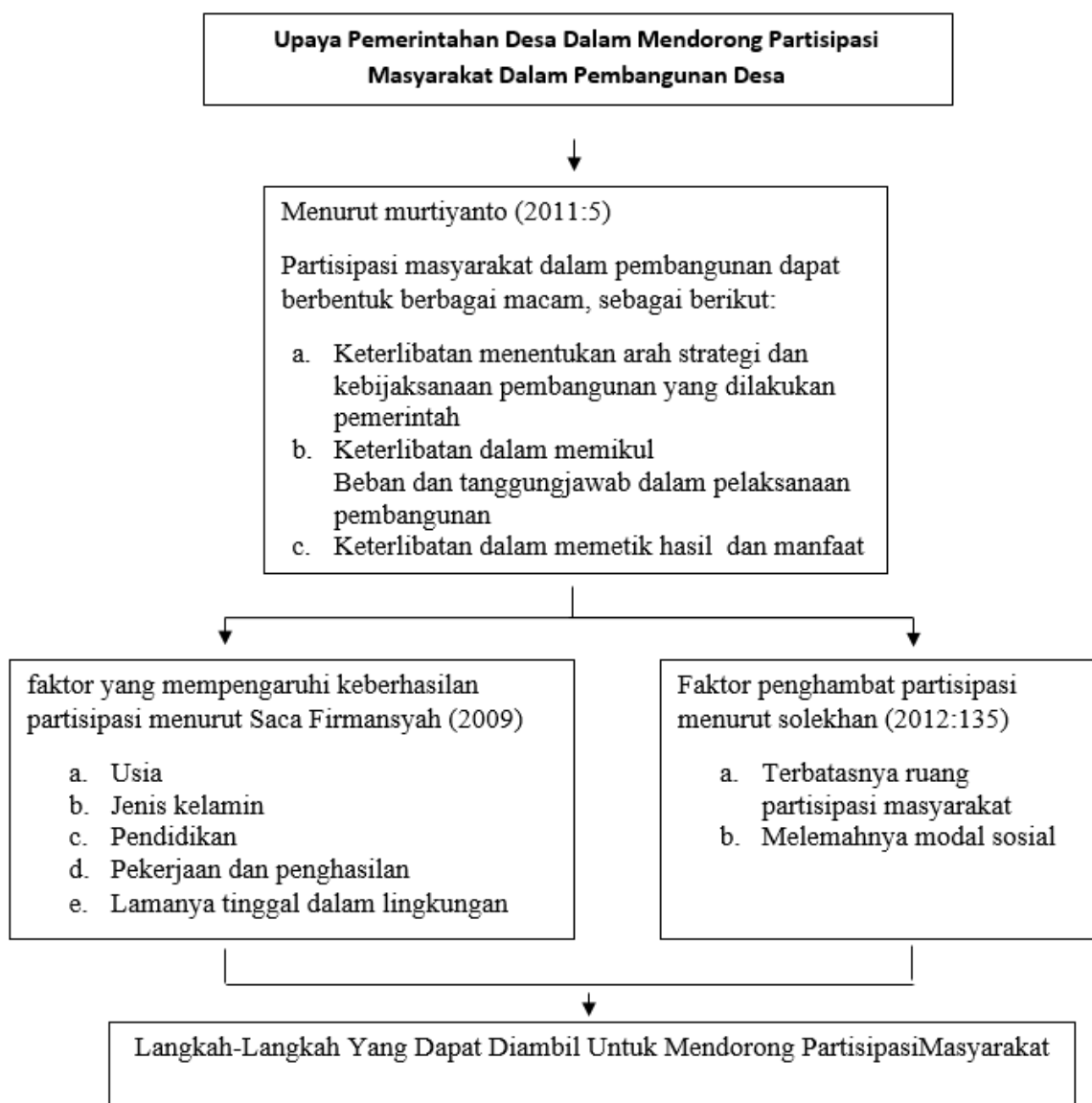
- a. Pembangunan adalah mendirikan (mengadakan gedung/bangunan, jalan, dan lain-lainnya).
- b. Menurut Katz dalam Yuwono, pembangunan adalah perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai.
- c. Pembangunan mengandung arti sebagai suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, menjadi lebih matang, lebih maju, atau lebih terorganisasi.

Pembangunan adalah proses yang membawa masyarakat ke arah yang lebih maju, terorganisasi, dan bernilai. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Infrastruktur yang memadai—seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik—memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat sektor-sektor seperti transportasi, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Contohnya, perbaikan jalan desa dapat memperluas jangkauan pasar hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong konsumsi masyarakat.

Jika pembangunan infrastruktur di Desa X terealisasi, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan dasar dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya saing. Sebaliknya, infrastruktur yang tidak optimal akan menghambat kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa, karena infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan adalah fondasi tercapainya masyarakat desa yang produktif, sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

A. Kerangka Konseptual Dan Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka diuraikan hubungan variabel tersebut. Selanjutnya dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ke dalam gambar sebagai berikut:



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif** untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya di Desa Wawangrewu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali data secara menyeluruh melalui **wawancara, observasi, dan dokumentasi**. Data dikumpulkan dari **sumber primer**, seperti hasil kuesioner, wawancara, dan observasi langsung di lapangan, serta **sumber sekunder**, seperti dokumen resmi dan informasi yang relevan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **upaya Pemerintahan Desa (variabel X)** dalam **mendorong partisipasi masyarakat (variabel Y)**. Informasi diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan dan bukti empiris berupa catatan kegiatan pembangunan desa, musyawarah, dan dokumen program pembangunan. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder,

diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Untuk memastikan validitas atau keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan **empat kriteria uji keabsahan data** sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010:368–377), yaitu **kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas**.

A. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan. Beberapa teknik yang digunakan meliputi:

- a. **Perpanjangan Pengamatan** : Peneliti memperpanjang waktu pengamatan di lapangan sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Hal ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan benar-benar mampu menjawab rumusan masalah secara utuh.
- b. **Triangulasi** : Peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi, yaitu:
 - a) **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber.
 - b) **Triangulasi teknik**, yaitu mengecek keabsahan data melalui teknik yang berbeda terhadap sumber yang sama (misalnya wawancara, observasi, dan dokumentasi).
 - c) **Triangulasi waktu**, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.
- c. **Diskusi dengan Teman Sejawat** : Peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat yang memahami fokus penelitian untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta menghindari bias subjektif dalam penafsiran data.

B. Uji Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks atau situasi sosial lain. Untuk itu, peneliti menyajikan deskripsi data secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, agar pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian relevan untuk diterapkan dalam konteks serupa.

C. Uji Dependabilitas

Dependabilitas diuji dengan melakukan **audit terhadap keseluruhan proses penelitian**. Audit ini dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini adalah **dosen pembimbing**, yang menilai konsistensi peneliti dalam menentukan fokus masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti harus mampu menunjukkan jejak proses penelitiannya secara transparan.

D. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Uji ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, yakni dengan memastikan bahwa data dan interpretasi yang disajikan merupakan hasil proses yang obyektif dan dapat ditelusuri kembali ke data asli.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan merujuk pada rumusan masalah serta kerangka konseptual dalam bab sebelumnya, maka dalam pembahasan ini akan dijabarkan mengenai **upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.**

A. Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

a. Keterlibatan dalam Menentukan Arah Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan wawancara dengan informan utama serta pegawai pemerintah desa dan masyarakat Desa Mario, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meski demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat. Menurut Kepala Desa Mario, Bapak H. La Tejjo, S.E., kegiatan musyawarah desa dan gotong royong merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan musyawarah, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan ide, saran, serta turut menetapkan arah pembangunan desa.

b. Keterlibatan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menginginkan semua lapisan masyarakat ikut terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil Pembangunan dan menumbuhkan kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

c. Keterlibatan dalam Memetik Hasil dan Manfaat Pembangunan

Partisipasi masyarakat terbukti memberikan manfaat langsung dalam keberlangsungan pembangunan desa, seperti menjamin keberlanjutan program pembangunan karena masyarakat merasa memiliki, Memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, Meningkatkan kualitas hidup karena pembangunan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berbasis aspirasi masyarakat.

B. Faktor Penghambat dan yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

a. Terbatasnya Ruang Partisipasi

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam program pembangunan pagar rumah, pemerintah desa mewajibkan seluruh warga untuk ikut berpartisipasi. Namun, tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk membeli bahan bangunan. Akibatnya, ada sebagian warga yang tidak dapat berpartisipasi karena keterbatasan tersebut.

b. Melemahnya Modal Sosial

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melemahnya modal sosial menjadi salah satu kendala dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa berinisiatif menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan kerja bakti guna membangun solidaritas dan kerja sama antarwarga.

c. Usia

Terdapat perbedaan pola partisipasi antara generasi muda dan generasi tua. Generasi muda: Lebih aktif dan energik, serta memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ide pembangunan. Generasi tua: Memiliki pengalaman dan kebijaksanaan, namun terkendala oleh keterbatasan fisik dan minimnya literasi digital. Kedua generasi ini memiliki potensi untuk saling melengkapi jika diarahkan dan difasilitasi dengan baik.

d. Jenis Kelamin

Terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa faktor seperti peran domestik dan budaya patriarki dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa.

e. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan partisipasi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar dan aktif dalam pembangunan. Mereka juga berperan sebagai agen perubahan yang dapat memberikan arahan serta berbagi pengetahuan kepada masyarakat lainnya.

f. Pekerjaan dan Penghasilan

Keberagaman jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan masyarakat Desa X mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Mereka yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan lebih stabil cenderung lebih aktif dibandingkan yang tidak.

g. Lamanya Tinggal dalam Lingkungan

Warga lama lebih aktif dalam kegiatan sosial karena sudah memahami struktur sosial dan dinamika desa. Sebaliknya, warga baru masih dalam tahap adaptasi dan belum terlalu mengenal kegiatan kemasyarakatan, sehingga cenderung kurang aktif dalam berpartisipasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan komitmen dalam mendorong keterlibatan masyarakat melalui musyawarah dan gotong royong yang terbukti efektif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi aktif. Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap keberlanjutan program, pemahaman kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup, namun masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya solidaritas sosial, kesenjangan usia, gender, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta perbedaan lama tinggal yang memengaruhi tingkat keterlibatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi inklusif, adaptif, dan sesuai kondisi sosial-ekonomi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, saran yang diajukan adalah agar pemerintah desa merumuskan strategi yang lebih inklusif dengan meningkatkan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan forum komunikasi masyarakat; masyarakat diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dengan aktif berpartisipasi serta menumbuhkan kesadaran kolektif demi keberlanjutan program pembangunan; dan peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih mendalam, mencakup peran lembaga desa, tokoh masyarakat, serta pengaruh budaya lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D., Siti, I. (2009). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Astuti, D., Dwiningrum, S., & Irene, S. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam membayar pendidikan*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2023). *Statistik Desa Wajo 2023*. Wajo: BPS.
- Djalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

- Firmansyah, S. (2009). Partisipasi masyarakat. Diakses dari <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009>
- Firmansyah, S. (2009). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan umum. Diakses 2 Mei 2009, dari <http://ilmuperpustakaan.com>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(1), 66–75.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian & pengembangan masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Iqbal, Z., & Suleman, A. (2010). *Indonesia: Critical constraints for infrastructure development*. Saudi Arabia: Islamic Development Bank.
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Kuncoro. (2010). *Pembangunan pengawasan infrastruktur fisik dan non fisik*. Jakarta: Erlangga.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Murtiyanto, N. (2011). Partisipasi masyarakat. Diakses 14 Mei 2017, dari <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas>
- Pratiwi, E. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi kasus di Desa Cikidang. *Jurnal Pembangunan dan Kewirausahaan*, 4(2), 145–158.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Rahayu, M. D. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Rahman, K. (2015). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(2), 189–199.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2012). *Metodologi penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2010). *Pengantar manajemen* (Edisi ke-1). Jakarta: Kencana.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, partisipasi dan good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyanto, S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(2), 45–58.

- Susantyo, B. (2007). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pedesaan: Telaahan atas tulisan David C. Korten. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 12(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v12i3.971>
- Theresia, A., et al. (2015). *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Ulyani, G. (2013). *Badan penelitian dan pengembangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, H. (2004). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.